

# PANCASILA DAN KEBUDAYAAN NASIONAL INDONESIA\*

Kirdi DIPOYUDO

Pancasila sebagai dasar falsafah negara, pandangan hidup dan moral bangsa Indonesia, yang terdiri atas nilai-nilai yang menjadi norma atau pedoman tingkah laku manusia dan negara Indonesia, adalah bagian inti serta jiwa kebudayaan nasional Indonesia dan landasan ideal pengembangannya. Berkat peranan Pancasila dalam pengembangan kebudayaan itu, kebudayaan nasional Indonesia menjadi semacam panglima seluruh kehidupan masyarakat dan negara yang mengarahkan dan memimpinnnya ke tujuannya, yaitu kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin bagi setiap dan semua warganya.

## PANCASILA INTI KEBUDAYAAN INDONESIA

Dalam artinya yang lengkap kebudayaan adalah keseluruhan pikiran, karya dan hasil karya manusia sebagai anggota masyarakatnya yang tidak berakar pada nalurinya dan hanya dapat dikuasai atau dihasilkannya dalam suatu proses belajar. Dalam arti ini kebudayaan adalah ungkapan kehidupan manusia dan masyarakatnya yang mengolah alam lingkungannya untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya dan mencakup segala perbuatan manusia. Dengan demikian kebudayaan

\* Karangan ini ditulis untuk ikut menyambut 50 tahun *Sumpah Pemuda* yang dapat dilihat sebagai lahirnya Bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia

bukanlah semata-mata sekumpulan barang dan karya kesenian, buku, bangunan dan lain sebagainya, melainkan juga dan pertama-tama kegiatan manusia membuat alat-alat dan benda-benda tersebut, adat istiadat, tata-cara, cara mengasuh anak, sistem-sistem sosial, pranata-pranata sosial dan lain sebagainya. Termasuk pula kegiatan manusia mengadakan pembaruan-pembaruan di segala bidang guna meningkatkan mutu hidupnya. Ciri khasnya ialah kemampuan manusia untuk belajar dan menemukan sesuatu baru demi perbaikan kehidupannya. Oleh sebab itu kebudayaan dapat dibatasi sebagai keseluruhan penemuan manusia demi perbaikan hidup manusiawi. Kebudayaan harus selalu mempunyai nilai hidup, artinya harus selalu mengabdikan kepada kehidupan manusiawi. Dalam rangka meningkatkan mutu hidup itu manusia menciptakan teknik-teknik dan organisasi-organisasi termasuk negara untuk meningkatkan efisiensi kerja guna mencapai hasil sebanyak mungkin dengan tenaga yang tersedia. Manusia selalu berusaha memperbaiki keduanya itu dalam pembaruan-pembaruan dan penemuan-penemuan baru.<sup>1</sup>

Setiap kebudayaan terdiri atas banyak unsur yang biasa dibagi dalam tujuh kelompok yang disebut universal budaya (cultural universals) karena bersifat universal, yaitu peralatan dan perlengkapan hidup manusia atau teknologi, mata pencarian dan sistem-sistem ekonomi, sistem-sistem sosial, bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan dan religi termasuk moralnya.<sup>2</sup> Berkat semuanya itu manusia dapat hidup aman dan mengembangkan dirinya serta mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya.

- 
- 1 Mengenai kebudayaan terdapat banyak definisi yang berbeda satu sama lain tetapi juga mengandung banyak unsur bersama. Dalam *Culture, A Critical Review of Concepts and Definitions* (Cambridge, Mass., 1952) A.L. Kroeber dan Cn Kluckhohn mengumpulkan 160 definisi, menganalisisnya dan mencari intinya serta membaginya dalam berbagai golongan. Umumnya kebudayaan diambil dalam artinya yang luas dan menyeluruh. Lihat antara lain Milton Singer, "The Concept of culture", dalam David L. Sills, Ed., *International Encyclopedia of the Social Sciences*, III, (New York — London, 1972), hal. 527-541
  - 2 Lihat Prof. Dr. Koentjaraningrat, *Pengantar Anthropologi* (Jakarta, 1969<sup>3</sup>), hal. 77-79; dan C. Kluckhohn, "Universal categories of culture", dalam *Anthropology Today*, 1953, hal. 507-523

Dalam Penjelasan pasal 32 UUD 1945 ditandaskan bahwa "Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi-daya Rakyat Indonesia seluruhnya"<sup>1</sup> Dengan perkataan lain, subyek kebudayaan nasional Indonesia adalah seluruh rakyat Indonesia, bukan suku bangsa ini atau suku bangsa itu. Secara tersirat itu berarti bahwa kebudayaan nasional Indonesia baru muncul dengan terbentuknya rakyat Indonesia. Sebelumnya yang ada ialah kebudayaan-kebudayaan daerah. Dengan demikian kebudayaan nasional Indonesia masih muda dan sedang pada tahap penyusunan dan pengembangan, biarpun unsur-unsurnya sudah tua. "Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa", demikian Penjelasan pasal 32 UUD 1945 tersebut lebih lanjut.<sup>2</sup> Artinya, kebudayaan nasional Indonesia terdiri atas unsur-unsur kebudayaan-kebudayaan daerah yang dapat dinilai sebagai puncak-puncaknya. Unsur-unsur yang baik diambil alih dan dikembangkan, sedangkan unsur-unsur yang kurang baik secara berangsur-angsur disingkirkan. Dalam GBHN 1978 ditetapkan sehubungan dengan Wawasan Nusantara: "Bahwa Budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu; sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya Bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan Budaya Bangsa seluruhnya."<sup>3</sup> Dengan demikian kebudayaan nasional Indonesia adalah bhinneka tunggal ika, satu tetapi beraneka ragam.

Nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila adalah bagian inti kebudayaan nasional Indonesia itu. Moral Pancasila bukanlah semata-mata satu bagian di samping bagian-bagian lain kebudayaan kita, melainkan bagian inti dan jiwanya. Moral Pancasila mengarahkan kebudayaan kita pada tujuannya dan memberikan dimensi manusiawi kepadanya. "Bentuk-bentuk kebudayaan sebagai pengejawantahan Pribadi Manusia Indonesia harus benar-benar menunjukkan nilai-nilai hidup dan makna kesuksesan yang dijiwai Pancasila", demikian ditetapkan dalam

1 Dikutip dari Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, I (Jakarta, 1971<sup>2</sup>), hal. 44-45

2 *Ibid.*

3 Dikutip dari *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1978* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1978), hal. 82

GBHN 1978 tersebut.<sup>1</sup> Berkat peranan Pancasila itu kebudayaan nasional Indonesia akan dapat memegang peranan yang diharapkan, yaitu sebagai panglima kehidupan bangsa Indonesia. Dalam arti itu kebudayaan nasional dapat berfungsi sebagai strategi kehidupan masyarakat dan negara Indonesia dan secara demikian menjamin tercapainya tujuan-tujuan nasional kita.<sup>2</sup>

## PANCASILA DASAR PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Oleh sebab itu moral Pancasila adalah juga dasar atau landasan ideal pengembangan kebudayaan nasional Indonesia. Sesuai dengan itu dalam GBHN 1978 ditandaskan bahwa "Kebudayaan nasional harus dibina atas dasar norma-norma Pancasila dan diarahkan pada penerapan nilai-nilai yang tetap mencerminkan kepribadian bangsa dan meningkatkan nilai-nilai yang luhur"<sup>3</sup>

Pertama-tama hal itu berarti bahwa moral Pancasila merupakan pedoman evaluasi dan seleksi atau penyaringan unsur-unsur budaya yang digunakan untuk menyusun dan mengembangkan kebudayaan kita. Unsur-unsur dari kebudayaan-kebudayaan daerah yang bertentangan dengan Pancasila harus ditolak dan disingkirkan secara berangsur-angsur, sedangkan unsur-unsurnya yang sesuai dengan sila-silanya dipelihara dan dikembangkan. Oleh sebab itu ditandaskan dalam GBHN bahwa "perlu ditiadakan dan dicegah nilai-nilai sosial budaya yang bersifat feodal dan kedaerahan yang sempit". Hal itu juga berlaku bagi unsur-unsur kebudayaan-kebudayaan asing karena dalam pembentukan kebudayaan nasional Indonesia kita harus terbuka. Dalam Penjelasan pasal 32 UUD 1945 ditandaskan bahwa usaha kebudayaan kita "tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkannya atau memperkaya kebudayaan sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia."<sup>4</sup> Juga dalam hal ini moral

1 *Ibid.*, hal. 91

2 Lihat C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta, 1976), khususnya hal. 9-33

3 Dikutip dari *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1978* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1978), hal. 114

4 Dikutip dari Muhammad Yamin, *op. cit.*, hal. 45

Pancasila berfungsi sebagai pedoman. Dengan perkataan lain, kita harus menolak unsur-unsur yang bertentangan dengan Pancasila tetapi bersedia menyerap unsur-unsur positif yang sesuai dengan sila-silanya. Sehubungan dengan itu dalam GBHN 1978 ditandaskan: "Dengan tumbuhnya kebudayaan nasional yang berkepribadian dan berkesadaran maka sekaligus dapat ditanggulangi pengaruh kebudayaan asing yang negatif, sedang di lain pihak ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menyaring dan menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan yang memang diperlukan bagi pembaruan dalam proses pembangunan."<sup>1</sup>

Semuanya itu berarti bahwa kita harus terbuka untuk akulturasi. Dari sejarah kita tahu bahwa kebudayaan yang menutup dirinya dan menolak pertukaran dengan kebudayaan-kebudayaan lain biasanya macet dan ketinggalan jaman. Akulturasi adalah perlu bagi setiap kebudayaan, tidak hanya untuk berkembang tetapi juga untuk bertahan. Pancasila adalah hasil akulturasi serupa itu seperti ditandaskan oleh Presiden Soeharto pada Hari Ulang Tahun ke-XXIV PARKINDO di Surabaya tanggal 15 Nopember 1969: "Pancasila sebenarnya bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan Bangsa kita sendiri, melihat pengalaman-pengalaman bangsa-bangsa lain, diilhami oleh ide-ide besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian Bangsa kita sendiri dan ide besar Bangsa kita sendiri."<sup>2</sup> Dengan perkataan lain, Pancasila adalah pusaka lama yang tumbuh dari jiwa dan kebudayaan bangsa Indonesia, tetapi telah berkembang di bawah ilham ide-ide besar dunia sehingga dapat menjadi dasar falsafat negara modern, lagi pula berfungsi sebagai pangkal pembaruan lebih lanjut untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Pancasila menolak pendirian sempit yang enggan mengambil unsur-unsur asing, tetapi juga menolak pendirian ekstrim lainnya, yang terlalu bersemangat untuk meniru segala sesuatu yang datang dari dunia barat dan mengacaukan modernisasi dengan westernisasi. Hal ini ditandaskan oleh Presiden Soeharto pada Upacara Peringatan

1 *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1978* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1978), hal. 114

2 Dikutip dari Krissantono, Ed., *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila* (Jakarta: CSIS, 1976), 10

## ANALISA

Ulang Tahun ke-XXV Universitas Gajah Mada tanggal 19 Desember 1974 sebagai berikut: "Dan jika dikatakan bahwa pembangunan memerlukan pembaruan, maka pembaruan ini sama sekali bukan 'pembaratan' (westernisasi), yang akan berarti penerapan kebudayaan lain yang asing bagi kita. Pembaruan tidak lain adalah usaha bagi bangsa sendiri untuk secara bagaimana mengembangkan kepribadiannya sendiri, dengan membuang yang buruk dan menguatkan yang baik, mengadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan masyarakat modern."<sup>1</sup>

Kedua, Pancasila adalah pedoman pengarah pengembangan kebudayaan kita agar kebudayaan nasional kita benar-benar dapat memainkan peranannya yang sangat penting untuk memberi arah dan membimbing seluruh pembangunan nasional kita. Dalam hubungan ini perlu dicatat, bahwa kebudayaan bukanlah semata-mata salah satu bidang kehidupan masyarakat dan negara di samping bidang-bidang lainnya seperti politik, ekonomi dan sebagainya, melainkan seluruh kehidupan bangsa yang mencakup bidang-bidang itu. Dengan demikian kebudayaan adalah strategi kehidupan masyarakat dan negara serta pembangunan nasional kita.<sup>2</sup> Agar berhasil pembangunan nasional kita harus diberi dimensi budaya. Dan hal ini terjadi dengan melaksanakan sila-sila Pancasila secara murni dan konsekwen dalam bidang-bidang tersebut. Secara konkrit itu berarti menyusun dan melaksanakan politik Pancasila, ekonomi Pancasila, sistem sosial Pancasila, sistem hukum Pancasila dan lain sebagainya, yang sebagai keseluruhan dapat disebut masyarakat Pancasila yang pada hakikatnya adalah masyarakat manusiawi. "Mewujudkan suatu masyarakat manusiawi (humane society) adalah sasaran terakhir seluruh pengembangan kebudayaan", demikian ditandaskan dalam deklarasi yang dikeluarkan di Yogyakarta pada 19 Desember 1973 oleh Konperensi Menteri-menteri Kebudayaan Asia.<sup>3</sup> Yang dimaksud dengan masyarakat

1 *Pidato Presiden Republik Indonesia Jendral Soeharto pada Upacara Peringatan Ulang Tahun ke-XXV Universitas Gajah Mada 19 Desember 1974 di Yogyakarta* (Jakarta: Departemen P dan K, 1975), hal. 5-6

2 Lihat Van Peursen, *op. cit.*, hal. 10

3 Laporan Konperensi, hal. 18

kat manusiawi ialah suatu masyarakat yang memungkinkan setiap dan semua warganya hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya sebaik mungkin dan mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya. Pancasila menempatkan manusia sebagai subyek dan tujuan masyarakat dan negara maupun pembangunan nasional.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas ini kiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, oleh sebab kebudayaan nasional Indonesia harus dibangun atas dasar moral Pancasila, maka dalam evaluasi dan seleksi unsur-unsur yang digunakan untuk menyusun dan menyempurnakan kebudayaan nasional Indonesia, moral Pancasila adalah norma tertinggi. Unsur-unsur yang melanggar atau merugikannya harus ditolak dan secara berangsur-angsur disingkirkan. Selain itu Pancasila harus menjiwai segala bidang kehidupan masyarakat dan negara, dan dengan maksud itu dituangkan dalam peraturan-peraturan perundangan yang mengaturnya. Secara demikian bidang-bidang itu tidak akan menghambat atau merugikan kehidupan susila rakyat, tetapi menunjang atau memungkinkannya.

Kebudayaan nasional Indonesia berorientasi pada manusia dengan menempatkannya sebagai subyek dan tujuan kehidupan masyarakat dan negara. Manusia diakui sebagai pribadi yang mempunyai martabat mulia dan hak-hak azasi yang harus dijunjung tinggi. Dengan perkataan lain kebudayaan kita harus memungkinkan setiap dan semua warga masyarakat hidup wajar sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mencapai kesejahteraan lahir batinnya selengkap mungkin secara merdeka sesuai dengan katahatinya. Dengan demikian kebudayaan kita mempunyai makna kesucilaan.

Dengan maksud itu pengembangan kebudayaan kita harus berarti pembangunan kembali masyarakat kita menjadi masyarakat manusiawi. Masyarakat Pancasila yang kita cita-citakan dan perjuangkan pada hakikatnya adalah masyarakat manusia-

## ANALISA

wi, suatu masyarakat di mana martabat dan hak-hak asasi setiap warganya dijunjung tinggi (kepastian hukum) dan tersedia baginya barang-barang dan jasa-jasa keperluan hidup secukupnya (kemakmuran umum). Masyarakat serupa itu juga melihat bangsa-bangsa lain sebagai sesama warga umat manusia dan bekerjasama dengan mereka untuk membangun dunia baru yang lebih baik atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.